EVALUASI KESESUAIAN DATA KEPENDUDUKAN DALAM SISTEM PENYALURAN BANTUAN JAMINAN KESEHATAN DI KOTA TERNATE PROVINSI MALUKU UTARA

Syafira Nurul Amanda
NPP. 33.1069
Program Studi Studi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Email: amandasyafiranurul@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Dra. Eva Eviany, M.Si
Email: evaeviany@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement: *The suitability of population data is an important factor in supporting the accuracy of the distribution of health insurance assistance targets. However, there is still the potential for data inconsistencies due to changes in population data, delays in data updates, and differences in data between agencies that can affect the effectiveness of aid distribution. In addition, research on evaluating the suitability of population data in the health insurance assistance distribution system at the local government level is still relatively limited, especially in Ternate City, North Maluku Province.* ***Purpose:*** *This study aims to evaluate the suitability of population data in the health insurance assistance distribution system in Ternate City, North Maluku Province.* ***Method:*** *This study uses a descriptive qualitative method with the CIPP (Context, Input, Process, Product) evaluation model. Data collection techniques were carried out through semi-structured interviews, observation, and documentation of informants from the Ternate City Social Service, the Ternate City Population and Civil Registration Service, BPJS Kesehatan, and aid recipients. The informants used in this study numbered 16 people. Data analysis used the interactive model of Miles, Huberman, and Saldaña supported by the NVivo 12 application.* ***Results:*** *The research findings indicate that the conformity of population data in the health insurance assistance distribution system in Ternate City has been running well. In the context dimension, the use of the Population Identification Number (NIK) as a single identity and regulatory support form the basis for program implementation. In the input dimension, data quality is supported by the availability of population data, human resources, and the completeness of community population documents. In the process dimension, data verification, validation, and matching are carried out through coordination between the Social Services Agency, the Population and Civil Registration Agency, and the BPJS Kesehatan (Social Security Agency). In the product dimension, a good level of data conformity has supported the accuracy of targeting health insurance assistance recipients in Ternate City.* ***Conclusion:*** *This study concludes that the conformity of population data in the health insurance assistance distribution system in Ternate City, North Maluku Province, has been running well and supports the accuracy of targeting health insurance assistance recipients.*

Keywords: *Health Insurance Assistance, CIPP, Population Data, Evaluation, Ternate City.*

ABSTRAK

Permasalahan: Kesesuaian data kependudukan merupakan faktor penting dalam mendukung ketepatan sasaran penyaluran bantuan jaminan kesehatan. Namun demikian, masih terdapat potensi ketidaksesuaian data akibat perubahan data penduduk, keterlambatan pembaruan data, serta perbedaan data antarinstansi yang dapat memengaruhi efektivitas penyaluran bantuan. Selain itu, penelitian mengenai evaluasi kesesuaian data kependudukan dalam sistem penyaluran bantuan jaminan kesehatan pada tingkat pemerintah daerah masih relatif terbatas, khususnya di Kota Ternate Provinsi Maluku Utara. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian data kependudukan dalam sistem penyaluran bantuan jaminan kesehatan di Kota Ternate Provinsi Maluku Utara. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan model evaluasi CIPP (*Context, Input, Process, Product*). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi terstruktur, observasi, dan dokumentasi terhadap informan yang berasal dari Dinas Sosial Kota Ternate, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, BPJS Kesehatan, serta masyarakat penerima bantuan. Informan yang digunakan pada penelitian ini berjumlah 16 orang. Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang didukung oleh aplikasi NVivo 12. **Hasil/temuan:** Temuan penelitian menunjukkan bahwa kesesuaian data kependudukan dalam sistem penyaluran bantuan jaminan kesehatan di Kota Ternate telah berjalan dengan baik. Pada dimensi *context*, penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai identitas tunggal dan dukungan regulasi menjadi dasar pelaksanaan program. Pada dimensi *input*, kualitas data didukung oleh ketersediaan data kependudukan, sumber daya manusia, dan kelengkapan dokumen kependudukan masyarakat. Pada dimensi *process*, verifikasi, validasi, dan pemadanan data dilakukan melalui koordinasi antara Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta BPJS Kesehatan. Adapun pada dimensi *product*, tingkat kesesuaian data yang baik telah mendukung ketepatan sasaran penerima bantuan jaminan kesehatan di Kota Ternate. **Kesimpulan:** Penelitian ini menyimpulkan bahwa kesesuaian data kependudukan dalam sistem penyaluran bantuan jaminan kesehatan di Kota Ternate Provinsi Maluku Utara telah berjalan dengan baik dan mendukung ketepatan sasaran penerima bantuan jaminan kesehatan.

Kata Kunci: Bantuan Jaminan Kesehatan, CIPP, Data Kependudukan, Evaluasi, Kota Ternate.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penduduk merupakan komponen penting dalam suatu negara yang bersifat dinamis. Jumlah penduduk akan berpengaruh terhadap kondisi sosial ekonomi suatu daerah (Imelda Hutasoit, 2017). Oleh karena itu, penduduk harus mempunyai data kependudukan yang jelas. Data kependudukan merupakan instrumen fundamental dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan pelaksanaan berbagai program kesejahteraan sosial. Dalam sistem penyaluran bantuan jaminan kesehatan, data kependudukan berfungsi sebagai dasar identifikasi, verifikasi, dan penetapan penerima manfaat sehingga menentukan ketepatan sasaran program. Program ini dirancang untuk melindungi masyarakat dari risiko kemiskinan akibat tingginya biaya pelayanan kesehatan sekaligus mewujudkan pemerataan akses layanan kesehatan bagi seluruh warga negara (Khanal et al., 2023). Oleh karena itu, ketepatan penetapan penerima manfaat menjadi aspek yang sangat penting, yang salah satunya dipengaruhi oleh kualitas dan kesesuaian data kependudukan yang digunakan dalam proses penyaluran bantuan.

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas data melalui integrasi data kependudukan, pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai identitas tunggal, serta pengembangan basis data kesejahteraan sosial. Namun dalam praktiknya masih ditemukan berbagai permasalahan seperti data ganda, NIK tidak aktif, perubahan status kependudukan yang belum diperbarui, dan keterlambatan sinkronisasi antarinstansi. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi efektivitas penyaluran bantuan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), khususnya bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI). Kondisi ini sejalan dengan temuan (Seo et al., 2023) yang menekankan pentingnya kesinambungan administrasi kepesertaan untuk menjaga akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang dijamin pemerintah.

Kota Ternate sebagai salah satu daerah yang melaksanakan Program JKN memerlukan sistem data kependudukan yang akurat dan terintegrasi. Keterlibatan Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, BPJS Kesehatan, serta pemerintah daerah menjadikan kesesuaian data kependudukan sebagai faktor penting dalam mendukung ketepatan sasaran penerima bantuan. Oleh karena itu, penelitian ini mengevaluasi kesesuaian data kependudukan dalam sistem penyaluran bantuan jaminan kesehatan di Kota Ternate menggunakan model evaluasi CIPP.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil

Penulis berfokus pada bagaimana kesesuaian data kependudukan dalam sistem penyaluran bantuan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui skema Penerima Bantuan Iuran (PBI) di Kota Ternate. Belum banyak penelitian yang secara khusus mengevaluasi bagaimana kesesuaian data kependudukan memengaruhi sistem penyaluran bantuan jaminan kesehatan kepada masyarakat penerima manfaat. Selain itu, penelitian terdahulu umumnya menggunakan pendekatan implementasi kebijakan atau kualitas pelayanan, sedangkan evaluasi menggunakan model CIPP (Context, Input, Process, Product) dalam konteks integrasi data kependudukan dan bantuan kesehatan masih terbatas.

Berbagai penelitian sebelumnya umumnya membahas kualitas pelayanan administrasi kependudukan, implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), validitas data bantuan sosial, maupun efektivitas Program JKN secara terpisah. Namun masih terdapat keterbatasan penelitian yang secara khusus mengevaluasi kesesuaian data kependudukan dalam

sistem penyaluran bantuan jaminan kesehatan menggunakan pendekatan evaluasi CIPP yang mencakup aspek konteks, input, proses, dan produk secara komprehensif. Selain itu, kajian yang berfokus pada Kota Ternate masih relatif terbatas sehingga diperlukan penelitian yang dapat memberikan gambaran empiris mengenai kondisi aktual kesesuaian data kependudukan dalam mendukung ketepatan sasaran penerima bantuan jaminan kesehatan. Kesenjangan penelitian lainnya terletak pada lokasi penelitian. Hingga saat ini masih sangat sedikit penelitian yang mengkaji kesesuaian data kependudukan dalam sistem penyaluran bantuan jaminan kesehatan di Kota Ternate, khususnya setelah adanya penguatan integrasi data sosial dan kependudukan nasional.

Meskipun penelitian terdahulu telah membahas administrasi kependudukan, pelayanan publik, identitas digital, dan kualitas tata kelola data, sebagian besar penelitian tersebut masih berfokus pada aspek pelayanan administrasi kependudukan atau implementasi sistem informasi secara terpisah.

1.3. Urgensi Penelitian

Penelitian ini penting dilakukan karena data kependudukan yang akurat merupakan prasyarat utama keberhasilan program bantuan jaminan kesehatan. Ketidaksesuaian data berpotensi menyebabkan salah sasaran, pemborosan anggaran, serta berkurangnya akses masyarakat miskin terhadap layanan kesehatan. Apabila penelitian ini tidak dilakukan, pemerintah daerah dan instansi terkait akan kekurangan dasar empiris dalam mengidentifikasi kelemahan sistem pengelolaan data serta merumuskan strategi peningkatan kualitas data kependudukan yang mendukung efektivitas penyaluran bantuan jaminan kesehatan.

1.4. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai administrasi kependudukan dan pemanfaatan data kependudukan telah banyak dilakukan. Namun, fokus kajian yang menghubungkan kesesuaian data kependudukan dengan sistem penyaluran bantuan jaminan kesehatan masih relatif terbatas. Maulana Akbar mengkaji bahwa ketidaktepatan data kependudukan menyebabkan beberapa permasalahan, seperti adanya masyarakat miskin yang tidak terdaftar, sementara warga yang sudah mampu tetap menerima bantuan (Maulana, 2019). Alif Kurniawan dan Muh. Amir mengkaji bahwa sinkronisasi data belum optimal, ditandai dengan masih banyaknya masyarakat yang mengalami kendala ketika mendaftar BPJS akibat ketidaksesuaian Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) dalam database nasional. Kondisi ini mengakibatkan warga harus melakukan pemutakhiran data terlebih dahulu agar dapat mengakses layanan (Alif Kurniawan & Muh. Amir, 2021).

Penelitian oleh Oltris Parontong mengkaji bahwa implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) berpengaruh positif terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado. Temuan tersebut menegaskan pentingnya kualitas data kependudukan dalam mendukung efektivitas pelayanan pemerintah (Oltris M. Parontong et al., 2020). Afif Syarifudin Yahya mengkaji mengenai tingkat kematangan perangkat daerah penyelenggara urusan administrasi kependudukan menunjukkan bahwa kapasitas organisasi dan tata kelola kelembagaan berpengaruh terhadap kualitas layanan administrasi kependudukan (Yahya, 2023). S. Mulyaningsih dan Bertha Lubis mengkaji mengenai pelayanan KTP-el menunjukkan bahwa keberhasilan penertiban administrasi kependudukan sangat dipengaruhi oleh integrasi sistem data, kesiapan petugas,

serta kualitas pelayanan kepada masyarakat (S. Mulyaningsih & Bertha Lubis, 2018). Rasyid Muhammad mengkaji kualitas basis data penduduk memiliki pengaruh langsung terhadap efektivitas program perlindungan sosial dan pelayanan Kesehatan dan mampu meningkatkan akurasi identifikasi penerima manfaat, mengurangi duplikasi data, serta mempercepat proses verifikasi penerima bantuan (Rasyid et al., 2025).

1.5. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Kebaruan penelitian ini terletak pada evaluasi keterkaitan antara kualitas data kependudukan dan sistem penyaluran bantuan jaminan kesehatan menggunakan model evaluasi CIPP. Penelitian ini menghasilkan gambaran empiris mengenai implementasi penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai identitas tunggal dalam proses verifikasi penerima bantuan jaminan kesehatan di Kota Ternate. Penelitian mengenai administrasi kependudukan dan program jaminan kesehatan telah banyak dilakukan sebelumnya. Namun, sebagian besar penelitian terdahulu lebih berfokus pada kualitas pelayanan administrasi kependudukan, implementasi kebijakan jaminan kesehatan, efektivitas program bantuan sosial, maupun pemanfaatan data kependudukan dalam pelayanan publik. Penelitian terdahulu juga umumnya mengkaji aspek pelayanan atau implementasi program secara parsial tanpa mengevaluasi kesesuaian data kependudukan sebagai dasar penetapan penerima bantuan jaminan kesehatan.

Berbeda dengan penelitian terdahulu, penelitian ini secara khusus mengevaluasi kesesuaian data kependudukan dalam sistem penyaluran bantuan jaminan kesehatan menggunakan model evaluasi CIPP (*Context, Input, Process, Product*) oleh (Daniel L. Stufflebeam, 2003). Selain itu, penelitian ini berfokus pada keterkaitan antara kualitas data kependudukan, proses verifikasi dan validasi data, koordinasi antarinstansi, serta ketepatan sasaran penerima bantuan jaminan kesehatan di Kota Ternate Provinsi Maluku Utara. Dengan demikian, kebaharuan penelitian ini terletak pada penggunaan model evaluasi CIPP untuk menilai kesesuaian data kependudukan sebagai dasar penyaluran bantuan jaminan kesehatan pada tingkat pemerintah daerah, yang belum banyak dikaji dalam penelitian sebelumnya.

1.6. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian data kependudukan dalam sistem penyaluran bantuan jaminan kesehatan di Kota Ternate Provinsi Maluku Utara.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang bertumpu pada filsafat postpositivisme untuk meneliti suatu objek yang alamiah, dimana peneliti merupakan indicator utama (Sugiyono, 2023). Pemilihan pendekatan kualitatif didasarkan pada tujuan penelitian yang ingin memahami secara mendalam kondisi kesesuaian data kependudukan dalam sistem penyaluran bantuan jaminan kesehatan di Kota Ternate Provinsi Maluku Utara. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang diteliti tidak hanya berkaitan dengan data statistik, tetapi juga melibatkan proses, mekanisme kerja, koordinasi antarinstansi, serta pengalaman dan pandangan para pihak yang terlibat dalam penyaluran bantuan jaminan kesehatan. Melalui pendekatan kualitatif, Peneliti dapat memperoleh informasi yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kesesuaian data kependudukan serta berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

Penelitian ini menggunakan model evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product) yang dikembangkan oleh Stufflebeam. Model CIPP dipilih karena mampu mengevaluasi program secara menyeluruh mulai dari aspek konteks, sumber daya yang digunakan, proses pelaksanaan, hingga hasil yang dicapai. Penggunaan model ini dinilai sesuai dengan tujuan penelitian yang berfokus pada evaluasi kesesuaian data kependudukan dalam sistem penyaluran bantuan jaminan kesehatan. Melalui evaluasi konteks, Peneliti mengidentifikasi kebutuhan dan dasar pelaksanaan program. Evaluasi input digunakan untuk menilai sumber daya, sistem, dan kelengkapan data yang digunakan. Evaluasi proses dilakukan untuk mengetahui mekanisme verifikasi, validasi, dan pemutakhiran data. Sementara itu, evaluasi produk digunakan untuk menilai hasil pelaksanaan program, termasuk tingkat kesesuaian data dan ketepatan sasaran penerima bantuan (Daniel L. Stufflebeam, 2003).

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur karena memberikan keleluasaan kepada Peneliti untuk menggali informasi lebih mendalam tanpa mengabaikan fokus penelitian. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung proses pelayanan, verifikasi data, dan pelaksanaan program pada instansi terkait. Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data pendukung berupa regulasi, laporan, dokumen administrasi, serta data kepesertaan yang relevan dengan penelitian.

Informan yang digunakan pada penelitian ini berjumlah 16 orang, yang terdiri dari 3 pejabat struktural Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2 staf/pelaksana teknis layanan administrasi kependudukan, 2 petugas Dinas Sosial (pengelola DTSEN), 2 petugas BPJS Kesehatan (bagian pendaftaran & kepesertaan), 2 lembaga kemasyarakatan Kelurahan, serta 5 masyarakat Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK). Informan kunci dalam penelitian ini adalah pejabat atau petugas yang menangani pengelolaan data penerima bantuan pada Dinas Sosial Kota Ternate. Informan tersebut dipilih karena memiliki peran utama dalam proses pendataan, verifikasi, validasi, dan pengusulan penerima bantuan jaminan kesehatan. Selain itu, informan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipilih karena bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan pemutakhiran data kependudukan yang menjadi dasar dalam proses penyaluran bantuan. Sementara itu, informan dari BPJS Kesehatan dipilih karena memiliki kewenangan dalam pengelolaan kepesertaan JKN dan pelaksanaan program PBIJKN. Masyarakat penerima bantuan dipilih untuk memperoleh informasi mengenai pengalaman mereka sebagai penerima manfaat serta untuk memverifikasi kesesuaian data yang digunakan oleh instansi terkait.

Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, BPJS Kesehatan, dan masyarakat penerima bantuan. Selain itu, digunakan triangulasi teknik dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penggunaan triangulasi bertujuan untuk meningkatkan tingkat kepercayaan terhadap hasil penelitian sehingga temuan yang diperoleh memiliki validitas yang kuat dan sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan.

Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kondensasi data dilakukan dengan memilih dan menyederhanakan informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Data yang telah diperoleh kemudian disajikan dalam bentuk uraian naratif, tabel, dan visualisasi data untuk memudahkan proses interpretasi. Tahap terakhir adalah penarikan

kesimpulan yang dilakukan secara terus-menerus selama proses penelitian hingga diperoleh temuan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa Kota Ternate merupakan salah satu daerah yang melaksanakan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan melibatkan berbagai instansi terkait, seperti Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta BPJS Kesehatan. Penelitian dilaksanakan selama kurang lebih satu bulan, dimulai pada bulan Maret hingga April 2025, yang mencakup kegiatan persiapan penelitian, pengumpulan data lapangan, analisis data, dan penyusunan hasil penelitian.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis mengevaluasi kesesuaian data kependudukan dalam sistem penyaluran bantuan jaminan Kesehatan di Kota Ternate Provinsi Maluku Utara menggunakan teori evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product), sebagai berikut:

3.1 Context (Konteks)

Evaluasi konteks dilakukan untuk mengetahui kesesuaian kebutuhan program dengan kondisi yang melatarbelakangi pelaksanaan penyaluran bantuan jaminan kesehatan di Kota Ternate. Berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta BPJS Kesehatan, diperoleh informasi bahwa data kependudukan menjadi dasar utama dalam penetapan penerima bantuan jaminan kesehatan. Penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai identitas tunggal bertujuan untuk memastikan bahwa bantuan diberikan kepada masyarakat yang memenuhi kriteria penerima manfaat.

Hasil dokumentasi menunjukkan bahwa pelaksanaan program didukung oleh berbagai regulasi yang mengatur administrasi kependudukan dan jaminan kesehatan. Regulasi tersebut menjadi dasar bagi instansi terkait dalam melakukan verifikasi, validasi, dan pemadanan data penerima bantuan. Berdasarkan hasil observasi, koordinasi antarinstansi telah berjalan melalui mekanisme pertukaran data dan pemanfaatan sistem informasi yang mendukung integrasi data kependudukan dengan data kepesertaan bantuan kesehatan.

Selain itu, hasil analisis menggunakan NVivo 12 menunjukkan bahwa kata “kependudukan”, “masyarakat”, “bantuan”, dan “kesehatan” merupakan kata yang paling dominan muncul dalam data penelitian. Temuan ini menunjukkan bahwa data kependudukan memiliki keterkaitan yang kuat dengan proses penyaluran bantuan jaminan kesehatan sehingga kesesuaian data menjadi kebutuhan utama dalam pelaksanaan program.

3.2 Input (Masukan)

Evaluasi input dilakukan untuk menilai sumber daya yang digunakan dalam mendukung kesesuaian data kependudukan dalam sistem penyaluran bantuan jaminan kesehatan. Berdasarkan hasil wawancara, salah satu sumber daya utama yang digunakan adalah data kependudukan yang dikelola oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate. Data tersebut meliputi NIK, Kartu Keluarga, nama, alamat, dan informasi kependudukan lainnya yang digunakan dalam proses penetapan penerima bantuan.

Hasil wawancara dengan masyarakat penerima PBI-JKN menunjukkan bahwa sebagian besar informan telah memiliki dokumen kependudukan yang lengkap berupa KTP elektronik dan Kartu Keluarga. Kelengkapan dokumen tersebut mempermudah proses

verifikasi dan validasi data penerima bantuan. Kelengkapan dokumen kependudukan, akses informasi, serta pendampingan dari instansi terkait menjadi faktor yang mendukung kelancaran penyaluran bantuan jaminan kesehatan. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Smiley et al., 2023) yang menunjukkan bahwa dukungan sosial dan kemudahan pemanfaatan sumber daya berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan dan keberhasilan penerima manfaat dalam mengakses layanan yang tersedia. Hasil observasi juga menunjukkan bahwa sebagian besar data masyarakat yang tercatat dalam sistem telah sesuai dengan dokumen kependudukan yang dimiliki.

Selain sumber daya data, pelaksanaan program juga didukung oleh sumber daya manusia dari Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta BPJS Kesehatan yang terlibat dalam pengelolaan data dan pelayanan kepada masyarakat. Hasil visualisasi hierarchy chart menggunakan NVivo menunjukkan bahwa penggunaan NIK, koordinasi antarinstansi, dan kelengkapan dokumen kependudukan merupakan faktor dominan yang mendukung kualitas data dalam sistem penyaluran bantuan jaminan kesehatan.

3.3 Process (Proses)

Evaluasi proses dilakukan untuk mengetahui bagaimana mekanisme pengelolaan data kependudukan dalam sistem penyaluran bantuan jaminan kesehatan dilaksanakan. Berdasarkan hasil wawancara, proses penyaluran bantuan diawali dengan pengumpulan dan pemutakhiran data masyarakat yang kemudian diverifikasi dan divalidasi oleh instansi terkait. Dalam proses tersebut, NIK digunakan sebagai instrumen utama untuk melakukan pemadanan data antara Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta BPJS Kesehatan.

Hasil observasi menunjukkan bahwa verifikasi data dilakukan secara berjenjang guna memastikan kesesuaian identitas penerima bantuan. Petugas melakukan pengecekan terhadap NIK, Kartu Keluarga, alamat, dan status kependudukan sebelum data ditetapkan sebagai penerima bantuan. Proses tersebut bertujuan untuk meminimalkan kesalahan data dan meningkatkan ketepatan sasaran penerima bantuan.

Dokumentasi yang diperoleh menunjukkan bahwa mekanisme koordinasi antarinstansi telah berjalan melalui kegiatan sinkronisasi data, pemadanan data kependudukan, dan pembaruan data secara berkala. Meskipun masih ditemukan beberapa kasus perubahan alamat, perubahan susunan keluarga, dan keterlambatan pembaruan data, secara umum proses verifikasi dan validasi telah berjalan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.

3.4 Product (Hasil)

Evaluasi produk dilakukan untuk menilai hasil yang dicapai dari pelaksanaan sistem penyaluran bantuan jaminan kesehatan berdasarkan kesesuaian data kependudukan. Berdasarkan hasil wawancara dengan instansi terkait dan masyarakat penerima bantuan, diperoleh informasi bahwa sebagian besar data penerima bantuan telah sesuai dengan kondisi masyarakat yang sebenarnya. Data kependudukan yang digunakan dalam proses penyaluran bantuan dinilai cukup akurat sehingga mampu mendukung ketepatan sasaran penerima manfaat.

Keberhasilan suatu program kesehatan tidak hanya diukur dari tersedianya layanan kesehatan, tetapi juga dari kemampuan program tersebut dalam meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang membutuhkan (Tchouaket et al., 2023). Keberhasilan pelaksanaan program kesehatan sangat dipengaruhi oleh keterlibatan berbagai

pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, penyedia layanan kesehatan, dan masyarakat sebagai penerima manfaat program (Tchouaket et al., 2023).

Hasil observasi dan dokumentasi menunjukkan bahwa penggunaan NIK sebagai identitas tunggal berhasil mengurangi potensi terjadinya data ganda dan kesalahan identitas penerima bantuan. Selain itu, koordinasi antara Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta BPJS Kesehatan turut mendukung terciptanya data yang lebih akurat dan mutakhir.

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, tingkat kesesuaian data kependudukan dalam sistem penyaluran bantuan jaminan kesehatan di Kota Ternate tergolong baik. Kesesuaian data tersebut berkontribusi terhadap ketepatan sasaran penerima bantuan dan mendukung kelancaran akses masyarakat terhadap layanan kesehatan melalui program Jaminan Kesehatan Nasional. Dengan demikian, data kependudukan yang akurat dan terintegrasi menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas penyaluran bantuan jaminan kesehatan di Kota Ternate Provinsi Maluku Utara.

3.5 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesesuaian data kependudukan dalam sistem penyaluran bantuan jaminan kesehatan di Kota Ternate tergolong baik. Temuan ini ditunjukkan melalui penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai identitas tunggal, pelaksanaan verifikasi dan validasi data secara berjenjang, serta koordinasi antarinstansi yang melibatkan Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan BPJS Kesehatan. Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dokumentasi, serta analisis menggunakan NVivo 12, ditemukan bahwa sebagian besar data penerima bantuan telah sesuai dengan kondisi masyarakat yang sebenarnya sehingga mendukung ketepatan sasaran penerima bantuan jaminan kesehatan.

Temuan pertama penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai identitas tunggal menjadi faktor penting dalam menjaga kesesuaian data kependudukan. NIK digunakan sebagai dasar pemadanan data antarinstansi sehingga dapat mengurangi potensi terjadinya data ganda maupun kesalahan identitas penerima bantuan. Temuan ini sama halnya dengan temuan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa pemanfaatan sistem administrasi kependudukan berbasis NIK mampu meningkatkan akurasi data dan efektivitas pelayanan publik (S. Mulyaningsih & Bertha Lubis, 2018). Penggunaan identitas tunggal memungkinkan proses integrasi data berjalan lebih baik karena seluruh instansi mengacu pada sumber data yang sama . Temuan penelitian ini memperkuat penelitian terdahulu karena menunjukkan bahwa manfaat penggunaan NIK tidak hanya dirasakan dalam pelayanan administrasi kependudukan, tetapi juga berpengaruh terhadap ketepatan sasaran program bantuan jaminan kesehatan.

Temuan kedua menunjukkan bahwa tingkat kesesuaian data kependudukan dalam sistem penyaluran bantuan jaminan kesehatan di Kota Ternate tergolong tinggi. Hasil observasi dan dokumentasi menunjukkan bahwa sebagian besar data penerima bantuan telah sesuai dengan data kependudukan yang tersimpan dalam sistem administrasi kependudukan. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa keberhasilan program perlindungan sosial sangat dipengaruhi oleh kualitas data penerima manfaat. Data yang akurat memungkinkan pemerintah mengidentifikasi kelompok sasaran secara tepat dan mengurangi risiko kesalahan penyaluran bantuan (Oltris M. Parontong et al., 2020). Temuan penelitian ini

memperkuat hasil penelitian terdahulu karena membuktikan bahwa integrasi data kependudukan dengan sistem penyaluran bantuan kesehatan mampu menghasilkan tingkat kesesuaian data yang lebih baik.

Temuan ketiga menunjukkan bahwa kesesuaian data kependudukan berkontribusi terhadap ketepatan sasaran penerima bantuan jaminan kesehatan. Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat penerima bantuan, sebagian besar informan menyatakan bahwa data identitas yang digunakan dalam kepesertaan bantuan telah sesuai dengan kondisi aktual mereka. Selain itu, penerima bantuan yang diwawancarai merupakan masyarakat yang memenuhi kriteria sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBIJKN) . Temuan ini sama halnya dengan penelitian sebelumnya yang menyebutkan bahwa validitas data penerima manfaat merupakan faktor utama dalam menjamin efektivitas program bantuan sosial dan kesehatan. Semakin baik kualitas data yang digunakan, semakin kecil kemungkinan terjadinya inclusion error maupun exclusion error dalam penyaluran bantuan (Maulana, 2019).

Temuan selanjutnya menunjukkan bahwa kesesuaian data kependudukan berkontribusi terhadap ketepatan sasaran penerima bantuan jaminan kesehatan. Kondisi ini mendukung tujuan program perlindungan kesehatan yang tidak hanya berorientasi pada penyediaan layanan kesehatan, tetapi juga pada peningkatan akses dan pemerataan manfaat layanan kesehatan bagi masyarakat yang membutuhkan (Tchouaket et al., 2023).

Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa masih terdapat beberapa kasus perubahan alamat, perubahan susunan keluarga, serta keterlambatan pembaruan data yang berpotensi memengaruhi kualitas data kependudukan. Temuan ini berbeda dengan beberapa penelitian terdahulu yang menyimpulkan bahwa integrasi data kependudukan mampu menghilangkan sebagian besar permasalahan data penerima bantuan. Pada penelitian ini, kendala tersebut masih ditemukan meskipun jumlahnya relatif kecil. Perbedaan temuan tersebut dapat disebabkan oleh karakteristik wilayah penelitian, dinamika perubahan data kependudukan masyarakat, serta adanya jeda waktu antara perubahan kondisi masyarakat dengan proses pembaruan data dalam sistem.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesesuaian data kependudukan memiliki hubungan yang erat dengan keberhasilan sistem penyaluran bantuan jaminan kesehatan. Temuan penelitian memperkuat berbagai penelitian sebelumnya yang menekankan pentingnya data kependudukan yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi sebagai dasar dalam pelaksanaan program perlindungan sosial. Selain itu, penelitian ini memberikan kontribusi baru melalui pengkajian kesesuaian data kependudukan dalam sistem penyaluran bantuan jaminan kesehatan menggunakan model evaluasi CIPP pada konteks daerah, khususnya di Kota Ternate Provinsi Maluku Utara.

3.6 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Selain temuan utama mengenai kesesuaian data kependudukan dalam sistem penyaluran bantuan jaminan kesehatan, penelitian ini juga menemukan beberapa temuan menarik yang turut memengaruhi kualitas pelaksanaan program. Salah satu temuan tersebut adalah pentingnya koordinasi antarinstansi dalam menjaga kualitas data penerima bantuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi antara Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta BPJS Kesehatan menjadi faktor yang mendukung proses verifikasi dan validasi data. Temuan ini sama halnya dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa integrasi data dan kolaborasi antarorganisasi merupakan salah satu kunci keberhasilan

pelaksanaan program pelayanan publik berbasis data. Melalui koordinasi yang baik, perbedaan data antarinstansi dapat diminimalkan sehingga kualitas data yang digunakan dalam penyaluran bantuan menjadi lebih akurat.

Temuan menarik lainnya adalah tingginya tingkat kepemilikan dokumen kependudukan masyarakat penerima bantuan. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, sebagian besar masyarakat penerima bantuan telah memiliki KTP elektronik dan Kartu Keluarga yang sesuai dengan kondisi aktual. Kondisi tersebut mempermudah proses verifikasi dan pemadanan data yang dilakukan oleh instansi terkait. Temuan ini memperkuat penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa kelengkapan administrasi kependudukan merupakan salah satu prasyarat penting dalam mendukung efektivitas pelayanan publik dan ketepatan sasaran program bantuan pemerintah. Temuan lainnya ialah menunjukkan bahwa keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh kualitas data yang digunakan, tetapi juga oleh kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya dan layanan yang tersedia. Hal ini memperkuat temuan penelitian (Smiley et al., 2023) yang menegaskan bahwa dukungan sosial dan akses terhadap sumber daya merupakan faktor penting dalam meningkatkan kesejahteraan penerima manfaat.

1. Faktor Penghambat

Meskipun secara umum kesesuaian data kependudukan telah berjalan dengan baik, penelitian ini masih menemukan beberapa faktor penghambat. Salah satunya adalah keterlambatan pembaruan data kependudukan akibat adanya perubahan kondisi masyarakat, seperti perpindahan domisili, perubahan susunan anggota keluarga, maupun perubahan status sosial ekonomi yang belum segera dilaporkan kepada instansi terkait. Faktor penghambat lainnya adalah masih adanya masyarakat yang kurang aktif dalam melakukan pembaruan dokumen kependudukan ketika terjadi perubahan data. Akibatnya, data yang tersimpan dalam sistem tidak selalu menggambarkan kondisi terbaru masyarakat sehingga dapat memengaruhi proses verifikasi penerima bantuan. Berdasarkan temuan tersebut, dapat dipahami bahwa keberhasilan penyaluran bantuan jaminan kesehatan tidak hanya ditentukan oleh kualitas data kependudukan, tetapi juga oleh komitmen masyarakat dalam memperbarui data serta efektivitas koordinasi antarinstansi dalam menjaga akurasi data secara berkelanjutan.

2. Faktor Pendukung

Salah satu faktor pendukung utama adalah koordinasi antarinstansi yang melibatkan Dinas Sosial Kota Ternate, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, serta BPJS Kesehatan. Koordinasi tersebut memudahkan proses verifikasi, validasi, dan pemadanan data penerima bantuan sehingga potensi terjadinya perbedaan data dapat diminimalkan. Hubungan kerja yang baik antarinstansi juga mempercepat penyelesaian permasalahan data yang ditemukan di lapangan. Faktor pendukung lainnya adalah kelengkapan dokumen kependudukan masyarakat. Kepemilikan KTP elektronik, Kartu Keluarga, dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang valid mempermudah proses identifikasi dan verifikasi calon penerima bantuan. Kelengkapan dokumen tersebut menjadi dasar utama dalam memastikan bahwa bantuan diberikan kepada masyarakat yang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Selain itu, implementasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) turut mendukung peningkatan kualitas data penerima bantuan. Kehadiran DTSEN membantu integrasi data

antarinstansi sehingga proses penetapan penerima bantuan menjadi lebih terarah, akurat, dan terhindar dari duplikasi data.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Evaluasi Kesesuaian Data Kependudukan dalam Sistem Penyaluran Bantuan Jaminan Kesehatan di Kota Ternate Provinsi Maluku Utara menggunakan model evaluasi CIPP, dapat disimpulkan bahwa kesesuaian data kependudukan dalam sistem penyaluran bantuan jaminan kesehatan telah berjalan dengan baik. Hal ini ditunjukkan oleh penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai identitas tunggal, tersedianya data kependudukan yang relatif akurat, pelaksanaan verifikasi dan validasi data secara berjenjang, serta koordinasi yang terjalin antara Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan BPJS Kesehatan. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa data kependudukan yang digunakan telah mendukung ketepatan sasaran penerima bantuan jaminan kesehatan sehingga sebagian besar penerima manfaat telah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Selain itu, koordinasi antarinstansi, kelengkapan dokumen kependudukan masyarakat, implementasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), serta monitoring dan evaluasi secara berkala menjadi faktor penting yang mendukung kualitas data. Meskipun masih ditemukan beberapa kendala berupa keterlambatan pembaruan data, perubahan alamat, dan perubahan susunan keluarga, kondisi tersebut tidak secara signifikan memengaruhi kualitas penyaluran bantuan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan integrasi data, percepatan pemutakhiran data kependudukan, serta peningkatan koordinasi dan monitoring secara berkelanjutan untuk menjaga kualitas data dan meningkatkan efektivitas penyaluran bantuan jaminan kesehatan di Kota Ternate.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada ruang lingkup penelitian yang hanya berfokus pada Kota Ternate serta keterbatasan waktu penelitian sehingga belum dapat mengkaji secara lebih mendalam perkembangan implementasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dalam jangka panjang terhadap sistem penyaluran bantuan jaminan kesehatan.

Arah Masa Depan Penelitian. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji efektivitas implementasi DTSEN dan integrasi data antarinstansi pada wilayah yang lebih luas dengan pendekatan kuantitatif maupun mixed methods guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai pengaruh kesesuaian data kependudukan terhadap ketepatan sasaran program bantuan sosial dan jaminan kesehatan.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam pelaksanaan penelitian ini, khususnya kepada Pemerintah Kota Ternate, Dinas Sosial Kota Ternate, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, BPJS Kesehatan Cabang Ternate, masyarakat penerima bantuan yang telah bersedia menjadi informan penelitian, serta dosen pembimbing dan civitas akademika Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) yang telah memberikan arahan, masukan, dan dukungan selama proses penyusunan penelitian ini. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu

pengetahuan dan perbaikan penyelenggaraan pelayanan publik, khususnya dalam pengelolaan data kependudukan dan penyaluran bantuan jaminan kesehatan.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Alif Kurniawan, & Muh. Amir. (2021). *Sinkronisasi Data Kependudukan antara BPJS, Disdukcapil dan Dinsos Kota Kendari*. *1*. https://ojs.uho.ac.id/index.php/pamarenda/article/view/20584

Daniel L. Stufflebeam. (2003). *Evaluation, Theory, Models, & Applications*. Daniel L. Stufflebeam.https://books.google.co.id/books/about/Evaluation_Theory_Models_and_Application.html?id=xx6UgC6UdFMC&redir_esc=y

Khanal, G. N., Bharadwaj, B., Upadhyay, N., Bhattarai, T., Dahal, M., & Khatri, R. B. (2023). Evaluation of the National Health Insurance Program of Nepal: are political promises translated into actions? *Health Research Policy and Systems*, *21*(1). https://doi.org/10.1186/s12961-022-00952-w

Maulana, A. (2019). Implementasi Kebijakan Verifikasi dan Validasi Data Penerima Bantuan Iuran-Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN) (Studi di Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember). *Tesis*, 1–271. https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/93376%0A

Oltris M. Parontong, Joyce J. Rares, & Johny H. Posumah. (2020). *Pengaruh siak terhadap pelayanan publik di dinasdukcapil kota manado* (jurnal administrasi publik, Tran.). *6*. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/issue/view/2709

Rasyid, M., Pt, J., Teknologi, M., Jakarta, K., Id, I. R., & Aqid, B. M. (2025). *Implementation of EMR System in Indonesian Health Facilities: Benefits and Constraints*. https://doi.org/10.7454/ihpa.v10i1.1140

S. Mulyaningsih & Bertha Lubis. (2018). *Antara Pelayanan Ktp El Danmasyarakat Untuk Masyarakat Jawa Barat Di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)*. *6*. http://eprints2.ipdn.ac.id/id/eprint/527

Seo, B., Turman, J. E., & Nan, H. (2023). Health insurance coverage and poverty status of postpartum women in the United States in 2019: an acs-pums population-based crosssectional study. *BMC Public Health*, *23*(1). https://doi.org/10.1186/s12889-02317087-4

Smiley, Y., Manget, J., Barber, J., Clarence, I., Enwerem, N., Jolda, C., Quinn, P., Wesley, Z. J., White, D., & Chokshi, B. (2023). Social support, resource utilization, and wellbeing: a survey of adolescent parents in Washington, DC. *BMC Public Health*, *23*(1). https://doi.org/10.1186/s12889-023-16185-7

Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif* (S. P. M. Dr. Ir. Sutopo, Ed.). Alfabeta Bandung. https://id.scribd.com/document/452452728/baixardoc-comsugiyono-metode-penelitian-kuantitatif-kualitatif-dan-r-d-pdf

Tchouaket, E., Karemere, H., Sia, D., & Kapiteni, W. (2023). An Analysis of the Social Impacts of a Health System Strengthening Program Based on Purchasing Health Services. *Journal of Epidemiology and Global Health*, *13*(4), 751–773. https://doi.org/10.1007/s44197-023-00147-8

Yahya, A. S. (2023). Tingkat Kematangan Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Studi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020). *Jurnal Media Birokrasi*, 218–241. https://doi.org/10.33701/jmb.v5i2.3993

Imelda Hutasoit. (2017). *Pengantar Ilmu Kependudukan*. http://eprints2.ipdn.ac.id/id/eprint/934/